

2022



b.g.p
Balai Guru Penggerak

**Kalimantan
Selatan**

LAPORAN KINERJA



**Balai Guru Penggerak
Provinsi Kalimantan Selatan**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya BGP Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022. BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum BGP Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022.

Banjarbaru, 27 Januari 2023

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan

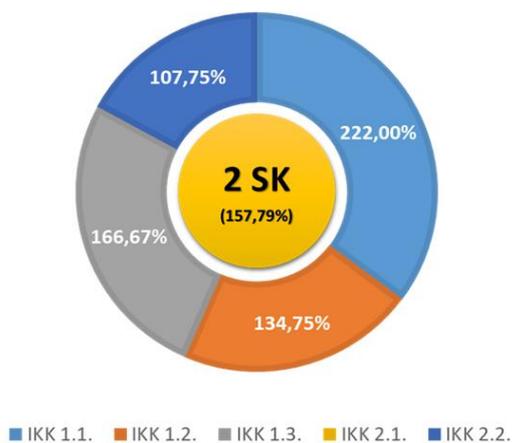


Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

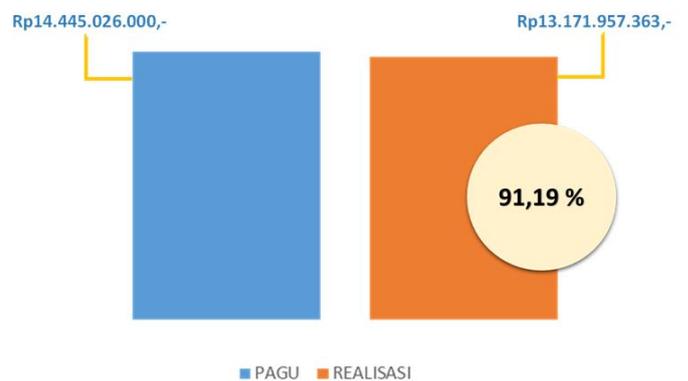
Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini Secara umum, capaian kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

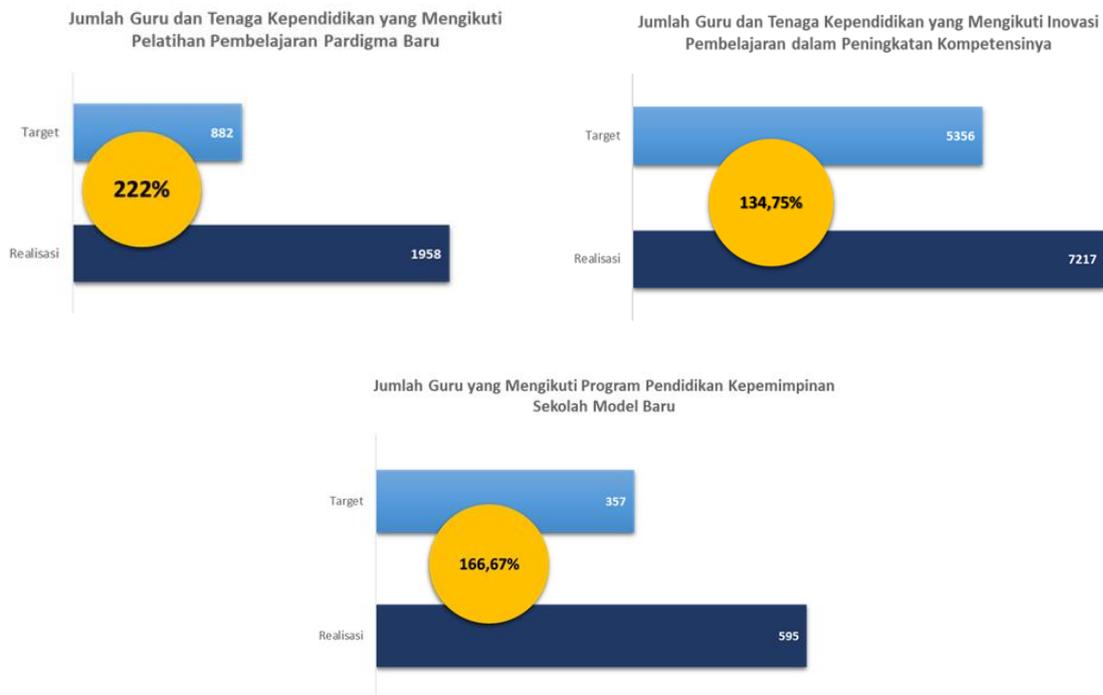
Capaian Kinerja



Penyerapan Anggaran



Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan



Meningkatnya Tata Kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 0. 1. Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2022

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Terjadinya restrukturisasi organisasi (bulan Mei) dan DIPA satker yang lambat terbit (bulan oktober) sementara waktu pelaksanaan program/kegiatan begitu singkat;
2. Kurangnya sumber daya manusia dikarenakan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan baru berdiri sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2022 yang mana Kepala Balai baru dilantik bulan Mei 2022 sedangkan pelaksanaan BGP Provinsi Kalimantan Selatan baru terlaksana pada bulan Juli 2022, efektif realisasi anggaran mulai bulan Oktober 2022.

Upaya/strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Dengan durasi/waktu pelaksanaan kegiatan yang begitu singkat sementara program/kegiatan banyak yang harus segera dilaksanakan harus diimbangi dengan perencanaan dan penjadwalan yang tepat, koordinasi internal maupun pihak eksternal terkait, menetapkan pola pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk perbaikan selanjutnya;
2. Optimalisasi SDM yang ada dengan cara pembagian tugas dan jadwal dalam melaksanakan kegiatan serta diharapkan kedepannya segera mengadakan rekrutmen CPNS/PPPK atau ada mutasi/penataan pegawai di lingkungan Kemendikbudristek.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	3
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi.....	5
BAB II Perencanaan Kinerja	6
Visi:.....	6
Rencana Kinerja Jangka Menengah:.....	6
Perjanjian Kinerja:	8
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	11
A. Capaian Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan	11
B. Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV Penutup	27
Lampiran :	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Matriks Target Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan	7
Tabel 2. 2. Perjanjian Kinerja Awal BGP Provinsi Kalimantan Selatan	8
Tabel 2. 3. Revisi Perjanjian Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan	9
Tabel 3. 1. Capaian Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	11
Tabel 3. 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan IKK. 1.1 “Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru”	13
Tabel 3. 3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan IKK.1.2 “Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetesinya”.....	16
Tabel 3. 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan IKK.1.3 “Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru”	20
Tabel 3. 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan IKK.2.2 “Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Kalimantan Selatan”	24
Tabel 3. 6. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	26
Tabel 3. 7. Alokasi dan realisasi Anggaran serta Sisa Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Jenis Belanja	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 0. 1. Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2022	iii
Gambar 1. 1. Wilayah kerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan.....	2
Gambar 1. 2. Struktur Organisasi BGP Provinsi Kalimantan Selatan.....	4
Gambar 4. 1. Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2022	27

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

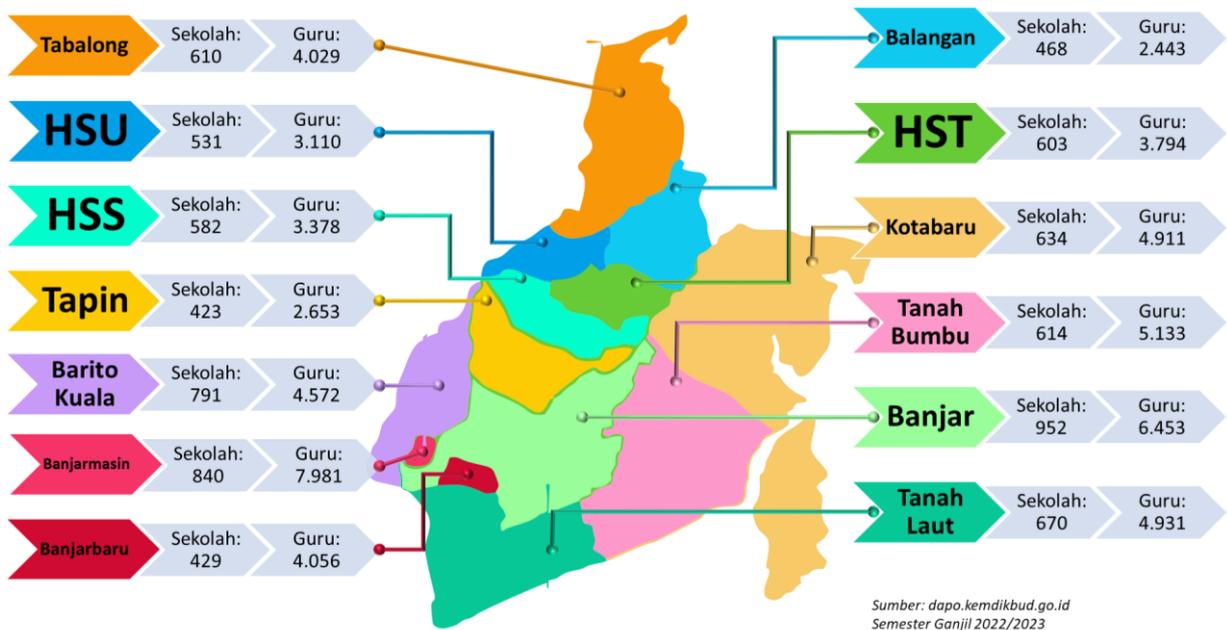
Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan pertama kali dibentuk pada 5 April 2022. Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan dipimpin oleh Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd. dengan jumlah SDM sebanyak 68 orang terdiri dari 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Wilayah kerja Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan melingkupi 13 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Kota Banjarbaru;
2. Kota Banjarmasin;
3. Kabupaten Banjar;
4. Kabupaten Barito Kuala;
5. Kabupaten Tapin;
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
9. Kabupaten Balangan;
10. Kabupaten Tabalong;
11. Kabupaten Tanah Laut;
12. Kabupaten Tanah Bumbu;
13. Kabupaten Kotabaru.

KALIMANTAN SELATAN

Sekolah: 8.147 Guru: 57.507



Gambar 1. 1. Wilayah kerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak;
10. DIPA Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan No SP DIPA - 023.16.2.690604/2022 Tanggal 17 Nopember 2021.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, BGP Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

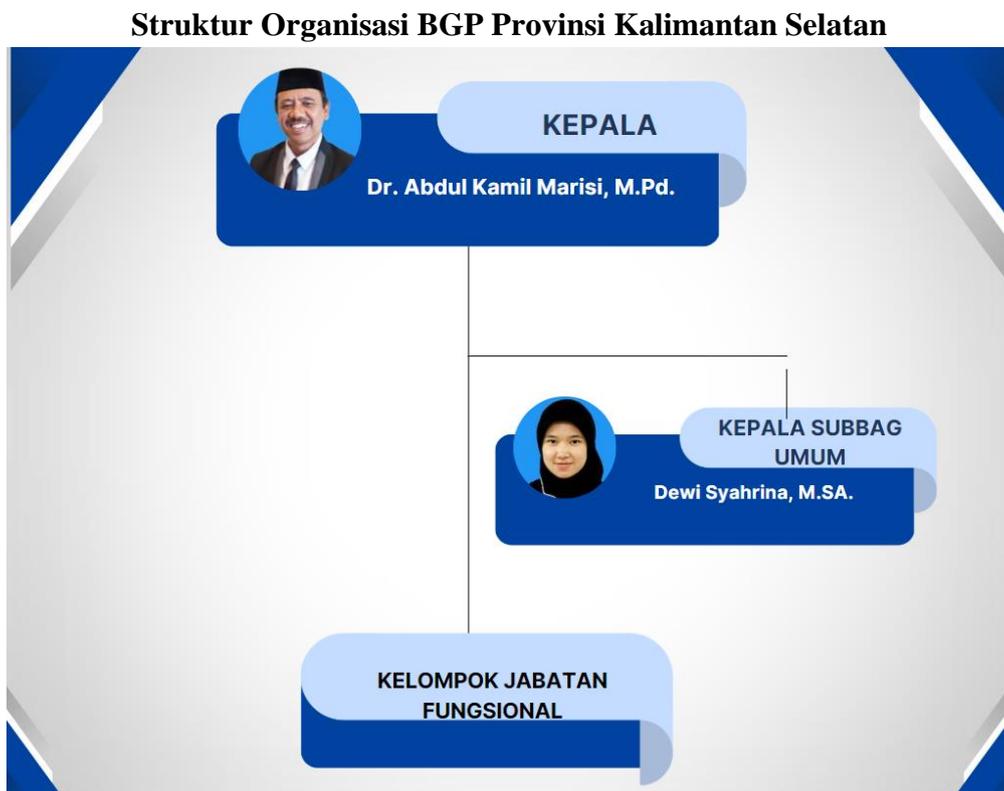
Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Fungsi :

BGP Kalimantan Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
2. Pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
3. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;

5. Pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
8. Pelaksanaan urusan administrasi.



Gambar 1. 2. Struktur Organisasi BGP Provinsi Kalimantan Selatan

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

- a. Kompetensi guru dan tenaga kependidikan belum terpetakan optimal;
- b. Pengembangan model peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan belum optimal;
- c. Kompetensi guru dan tenaga kependidikan belum merata;
- d. Fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan belum optimal;
- e. Supervisi kompetensi peningkatan guru dan tenaga kependidikan belum optimal;
- f. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan belum optimal;
- g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan GTK masih terbatas pada kabupaten tertentu saja.

2. Peran Strategis

- a. Memetakan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
- b. Mengembangkan model peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
- c. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
- d. Memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
- e. Mensupervisi kompetensi peningkatan guru dan tenaga kependidikan
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan
- g. Melaksanakan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan GTK

BAB II

Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Sebagai upaya penjabaran dari visi tersebut, balai menetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan;

Rencana Kinerja Jangka Menengah:

Dengan dibentuknya Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, maka perencanaan jangka menengah dimulai dari 2022 dengan sasaran, indikator, dan target yang disusun dari 2022 hingga 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Matriks Target Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan

#	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
1.1	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	IKK	882	1176	2353
1.2	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	IKK	5356	5356	5356
1.3	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	IKK	357	447	447
2.0	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan				
2.1	Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	IKK	-	BB	A
2.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	IKK	85	90	92

Perjanjian Kinerja:

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, BGP Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Perjanjian Kinerja Awal BGP Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	882
	[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	5356
	[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	357
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	-
	[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	85
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 16.502.833.000,-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 2.293.178.000,-
TOTAL		Rp 18.796.011.000,-

Tabel 2. 3. Revisi Perjanjian Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	882
	[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	5356
	[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	357
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	-
	[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	85

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 12.373.963.000,-
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 2.071.063.000,-
TOTAL		Rp 14.445.026.000,-

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, BGP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan dua sasaran dengan lima indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Capaian Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Pembelajaran Paradigma Baru	882	1.958	222,00%
	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensinya	5.356	7.217	134,75%
	Jumlah Guru yang Mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	357	595	166,67%
Meningkatnya Tata Kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL BGP Kalimantan Selatan	85	91,59	107,75%

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian target-target dari 4 IKK tersebut dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi dari setiap IKK dengan target yang ditetapkan, baik ketercapaian secara fisik

maupun anggaran dengan tingkat realisasi ketercapaian sasaran kegiatan BGP Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan definisi operasional.

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2022, BGP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sasaran strategis/sasaran kegiatan (SK.1) dengan 3 indikator kinerja, dan sasaran strategis/sasaran kegiatan (SK.2) dengan 1 indikator kinerja. Berikut analisis informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2022 dari masing-masing indikator kinerja sesuai yang tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Pembelajaran Paradigma Baru

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru.

Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi dimana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi sehingga guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan salah satu bentuk intervensi Program Sekolah Penggerak.

BGP Provinsi Kalimantan Selatan sudah melaksanakan kegiatan yang menunjang capaian kinerja jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru yang didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$\Sigma G^{\text{Mengikuti Pembelajaran Paradigma Baru}} = A$$

Capaian IKK 1.1. sebesar 1.958 lebih tinggi dari target yang diperjanjikan tahun 2022 yang sebesar 822 orang. Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru serta perbandingan antara target dan realisasi capaian kerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan IKK. 1.1 “Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru”

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra	Target Akhir Renstra
		Target	Capaian	%		
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	-	882	1.958	222,00	882	2.680

Semua kegiatan yang mendukung IKK 1.1 telah selesai dengan total capaian jauh lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lokakarya Program Sekolah Penggerak Angkatan I yang melibatkan kepala sekolah dan 2 orang guru dari 49 sekolah penggerak dengan capaian sebanyak 147 orang;
2. Lokakarya Program Sekolah Penggerak Angkatan II yang melibatkan kepala sekolah dan 2 orang guru dari 136 sekolah penggerak dengan capaian sebanyak 408 orang;
3. Lokakarya Program Sekolah Penggerak yang melibatkan pengawas sekolah dengan capaian sebanyak 110 orang;
4. Kegiatan *In-House Training* Program Sekolah Penggerak Angkatan II dengan capaian 1.293 orang.

Realisasi terget sangat didukung oleh kerjasama dalam pelaksanaan program oleh individu dalam lembaga, baik dalam internal pokja maupun antar pokja, selain itu dukungan pihak eksternal seperti fasilitator dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Provinsi sangat berperan dalam keberhasilan capaian program.

Faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sangat didukung oleh kerjasama dalam pelaksanaan program oleh individu dalam lembaga, baik dalam internal pokja maupun antar pokja, selain itu dukungan pihak eksternal seperti fasilitator dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Provinsi sangat berperan dalam keberhasilan capaian program.

Masih terdapat hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kegiatan tersebut yaitu:

1. Terjadinya restrukturisasi organisasi (bulan Mei) dan DIPA satker yang lambat terbit (bulan oktober) sementara waktu pelaksanaan program/kegiatan Sekolah Penggerak sudah ada yang berlangsung sejak bulan September;
2. Kurangnya sumber daya manusia di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan sementara kebutuhan tenaga petugas atau panitia untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan yang terjadwal padat dan intens sehingga menyebabkan personel kegiatan kewalahan dan beban kerja yang lebih berat dari kondisi normal;
3. Tidak meratanya kompetensi Fasilitator dalam melakukan pendampingan ke Sekolah Penggerak;
4. Ada beberapa Fasilitator yang belum tertib dan tidak memenuhi durasi wajib pelaksanaan pendampingan secara daring;
5. Beberapa Fasilitator seringkali terbentur pelaksanaan kegiatan sehingga tidak memenuhi kewajiban di kegiatan PSP;
6. Belum adanya evaluasi dan penilaian berkala terhadap kinerja Fasilitator;
7. Minimnya jumlah pengawas sekolah di beberapa kabupaten/kota sehingga output dan sasaran kurang maksimal;
8. Kurang terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan PSP yang sangat padat dan intens dengan durasi waktu yang begitu singkat harus diimbangi dengan perencanaan dan penjadwalan yang tepat, koordinasi internal maupun pihak eksternal terkait, menetapkan pola pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk perbaikan selanjutnya;
2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan segera mengadakan rekrutmen CPNS/PPPK atau mutasi di lingkungan Kemendikbudristek atau merekrut tenaga lepas tidak tetap;
3. Perlu dilakukan bimbingan teknis serta penguatan teknis dan administrasi agar dapat meningkatkan kompetensi Fasilitator;

4. Meningkatkan komunikasi, himbauan, dan penegasan terhadap aturan dan panduan pelaksanaan kegiatan;
5. Evaluasi dan penegasan komitmen dari Kepala BGP Provinsi Kalsel terhadap beberapa Fasilitator yang sering tidak melaksanakan kewajiban/tugas dikarenakan kesibukan di luar PSP;
6. Adanya instrumen dari Direktorat Teknis terkait sebagai pihak yang melakukan seleksi dan rekrutmen Fasilitator agar dapat mengevaluasi kinerja Fasilitator secara berkala;
7. Memberikan advokasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan agar segera memenuhi/menutupi kekurangan formasi pengawas sekolah;
8. Menjalin komunikasi dan mengadakan pertemuan dalam rangka koordinasi yang intens dengan pihak Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensinya

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan inovasi pembelajaran dalam pengembangan profesinya.

Salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran adalah dengan memanfaatkan platform teknologi yang bertujuan membantu pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran mandiri yang bisa disesuaikan dengan kondisinya kapan pun dan di mana pun dalam mengembangkan kompetensinya. Mendorong pendidik saling belajar dalam ruang kolaborasi dan komunitas belajar (*Learning Community*) dengan guru yang lain dalam hal berbagi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan (*Social Constructivism*).

Program Guru Belajar dan Berbagi merupakan salah satu contoh platform teknologi yang dirancang untuk membantu guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi peserta didik untuk melakukan merdeka belajar, yang terdiri dari: (1) Seri asesmen kompetensi minimum; (2) Seri literasi dan numerasi; (3) Seri pendidikan keterampilan hidup; (4) Seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK; (5) Seri pendidikan inklusif; dan (6) Seri masa pandemi Covid-19; dan lain sebagainya.

Sasaran program Guru Belajar dan Berbagi adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki akun SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan).

BGP Provinsi Kalimantan Selatan sudah melaksanakan kegiatan yang menunjang capaian kinerja jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya dengan realisasi sebanyak 7.217 orang yang didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$\Sigma \text{GTK}^{\text{Kompetensi}} = A$$

Capaian IKK 1.2. sebanyak 7.217 orang lebih tinggi dari target yang diperjanjikan tahun 2022 yang sebesar 5.356 orang. Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya serta perbandingan antara target dan realisasi capaian kerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3. *Capaian Indikator Kinerja Kegiatan IKK.1.2 “Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya”*

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra	Target Akhir Renstra
		Target	Capaian	%		
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya pendidikannya	-	5.356	7.217	134,75	5.356	5.356

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya adalah IKK yang diintervensi oleh Program Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Pada tahun 2022 capaian yang dicapai adalah sebesar 7.217 atau sebesar 134,75%. Semua kegiatan yang mendukung IKK 1.2 telah selesai dengan total capaian jauh lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai capaian IKK tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembekalan Narasumber Berbagi Praktik Baik dengan melibatkan 40 orang peserta;
2. Upgrading Narasumber Berbagi Praktik Baik dengan melibatkan 40 orang peserta;
3. Refleksi Narasumber Berbagi Praktik Baik dengan melibatkan 40 orang peserta;

4. Pembekalan Komunitas Belajar dengan melibatkan 42 orang peserta;
5. Upgrading Komunitas Belajar dengan melibatkan 42 orang peserta;
6. Refleksi Komunitas Belajar dengan melibatkan 42 orang peserta;
7. Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka, PMO, dan Layanan PSP Tahun 2022 dengan melibatkan 431 orang peserta;
8. Refleksi dan Optimalisasi Peran Guru Penggerak sebagai Upaya Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melibatkan 238 orang peserta;
9. Pelatihan IKM bagi GTK se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melibatkan 457 orang peserta;
10. Pelatihan Penguatan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melibatkan 50 orang peserta;
11. Pelatihan Penguatan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melibatkan 285 orang peserta;
12. Pelatihan Penguatan Kehumasan bagi GTK se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melibatkan 600 orang peserta;
13. Pelatihan Pembelajaran berbasis TIK se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melibatkan 750 orang peserta;
14. Pelatihan Pembelajaran berbasis HOTS se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melibatkan 750 orang peserta;
15. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melibatkan 300 orang peserta;
16. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Agama Islam (PAI) se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melibatkan 300 orang peserta;
17. Pelatihan Pemanfaatan *Google Workspace For Education* melalui Akun belajar.id dalam mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang melibatkan 318 orang peserta;
18. Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri dan Platform Merdeka Mengajar yang melibatkan 1.542 orang peserta;
19. Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri Belajar bagi SMPN 1 Banjarbaru yang melibatkan 55 orang peserta;
20. Webinar Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Tahun 2022 yang melibatkan 693 orang peserta;
21. Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) bagi Widyaiswara (WI) di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin yang melibatkan 27 orang peserta; dan

22. Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Kalangan TK Aisyiah Bustanul Athfal se Kalimantan Selatan yang melibatkan 175 orang peserta.

Keberhasilan pencapaian sehingga melebihi target yang ditetapkan dikarenakan pada beberapa kegiatan telah terdapat petunjuk teknis yang jelas dan telah terjadi koordinasi sebelum kegiatan tersebut dimulai sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu antusiasme di beberapa daerah cukup tinggi dalam pelaksanaan serta sosialisasi kurikulum merdeka. Jumlah peserta yang hadir banyak juga terjadi dikarenakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara daring sehingga peserta lebih mudah mengikuti dari lokasi masing-masing serta dengan adanya pemberian sertifikat juga menambah antusias peserta kegiatan.

Dalam pencapaian kegiatan tersebut terdapat hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kegiatan tersebut yaitu:

1. Terjadinya restrukturisasi organisasi (bulan Mei) dan DIPA satker yang lambat terbit (bulan oktober);
2. Kurangnya sumber daya manusia di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan sementara kebutuhan tenaga petugas atau panitia untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan yang terjadwal padat dan intens sehingga menyebabkan personel kegiatan kewalahan dan beban kerja yang lebih berat dari kondisi normal;
3. Ada salah satu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang kurang responsif dan sulit melakukan koordinasi;
4. Kurangnya alokasi anggaran program IKM sehingga menyebabkan masih banyaknya komitas belajar yang belum terakomodir mengikuti rangkaian kegiatan IKM;
5. Masih ada beberapa narasumber berbagi praktik baik yang belum berpartisipasi/belum memenuhi konten PMM.

Analisis terkait langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan IKM yang sangat padat dan intens dengan durasi waktu yang begitu singkat harus diimbangi dengan perencanaan dan penjadwalan yang tepat, koordinasi internal maupun pihak eksternal terkait, menetapkan pola pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk perbaikan selanjutnya;

2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan segera mengadakan rekrutmen CPNS/PPPK atau mutasi di lingkungan Kemendikbudristek atau merekrut tenaga lepas tidak tetap;
3. Menjalinkan komunikasi dan mengadakan pertemuan dalam rangka koordinasi yang intens dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Menambah alokasi anggaran di tahun anggaran berikutnya agar dapat mengakomodir dan memanggil peserta komunitas belajar untuk mengikuti kegiatan IKM;
5. Bekerjasama dengan Disdik Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk mensosialisasikan narasumber berbagi praktik baik di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan 1.3 Jumlah Guru yang Mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru

Program pendidikan kepemimpinan sekolah baru adalah program pendidikan guru penggerak, yaitu program pendidikan kepemimpinan bagi guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar pancasila. dengan kata lain program pendidikan guru penggerak adalah program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Program guru penggerak bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya agar menjadi guru penggerak/pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah.

BGP Provinsi Kalimantan Selatan sudah melaksanakan kegiatan Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru dengan realisasi sebanyak 595 orang, yang didapat dari perhitungan sebagai berikut :

$$\Sigma G^{\text{Mengikuti PGP}} = A$$

Capaian IKK. 1.3 sebanyak 595 orang lebih tinggi dari target yang diperjanjikan tahun 2022 yang sebesar 397 orang. Adapun tingkat ketercapaian kinerja Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru. serta perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan IKK.1.3 “Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru”

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra	Target Akhir Renstra
		Target	Capaian	%		
Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru.	-	357	595	166,67	357	447

Berdasarkan tabel di atas, IKK “Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru.” mempunyai target sasaran sebanyak 357 orang, sampai dengan bulan Desember tahun 2022 terealisasi sebanyak 595 orang.

Pada tahun 2022 realisasi IKK “Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru melebihi target indikator kinerja dikarenakan komitmen dan kualitas sumber daya manusia yang ada di BGP Provinsi Kalimantan Selatan walaupun dengan SDM yang terbatas mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, selain itu juga karena dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sasaran Pendidikan Guru Penggerak. Adapun kegiatan yang mendukung perealisasi target kinerja indikator adalah dilaksanakannya rapat koordinasi program pendidikan guru penggerak dengan kabupaten/kota untuk penyamaan persepsi, kegiatan pendampingan kelompok, pendampingan individu, pelatihan modul *learning management system (LMS)*, dan monitoring pendampingan individu, dengan sebaran jumlah calon guru penggerak sebagai berikut:

1. Angkatan 4 sebanyak 34 orang;
2. Angkatan 5 sebanyak 117 orang;
3. Angkatan 6 sebanyak 227 orang; dan
4. Angkatan 7 sebanyak 217 orang.

Namun didalam pelaksanaannya juga ditemui beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Terjadinya restrukturisasi organisasi (bulan Mei) dan DIPA satker yang lambat terbit (bulan Oktober);
2. Kurangnya sumber daya manusia di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan sementara kebutuhan tenaga petugas atau panitia untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan yang terjadwal padat dan intens sehingga menyebabkan personel kegiatan kewalahan dan beban kerja yang lebih berat dari kondisi normal;
3. Sulitnya melakukan koordinasi dan penerbitan surat tugas jenjang SMA/SMK/SLB oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Sulitnya menentukan sekolah di beberapa kabupaten/kota sebagai lokasi penyelenggaraan lokakarya yang bisa mengakomodir PP dan CGP yang tidak berasal dari sekolah lokasi penyelenggara serta terbatasnya fasilitas yang mendukung tugas panitia;
5. Kurangnya kompetensi/kemampuan beberapa Pengajar Praktik terutama saat pendampingan individu dan kurangnya pengetahuan beberapa Fasilitator terhadap sistem *LMS* serta tidak tertib dalam pemenuhan kewajiban *timespent*.
6. Kurangnya jumlah pengajar praktik sehingga daerah tersebut tidak dapat melaksanakan program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru;
7. Belum adanya sistem yang mendeteksi guru yang mendaftar program tersebut telah mendaftar pada program PPG sehingga pada saat pelaksanaan PGP dan CGP tersebut lulus PPG, CGP tersebut memilih mundur.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan PGP yang sangat padat dan intens dengan durasi waktu yang begitu singkat harus diimbangi dengan perencanaan dan penjadwalan yang tepat, koordinasi internal maupun pihak eksternal terkait, menetapkan pola pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk perbaikan selanjutnya;
2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan segera mengadakan rekrutmen CPNS/PPPK atau mutasi di lingkungan Kemendikbudristek atau merekrut tenaga lepas tidak tetap;
3. Menjalin komunikasi dan mengadakan pertemuan dalam rangka koordinasi yang intens dengan pihak Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Melakukan pemetaan dan pemilihan lokasi alternatif pengganti sekolah supaya tidak terbentur dengan lokasi asal PP dan CGP saat penyelenggaraan lokakarya;
5. Melakukan evaluasi kinerja berkala dan penilaian rutin agar dapat memberikan umpan balik ke semua pihak yang terlibat serta melakukan bimbingan teknis berkelanjutan agar menjaga mutu dan kompetensi pengajar praktik dan fasilitator.
6. melaksanakan sosialisasi dan *coaching clinic* untuk mendorong guru di kabupaten/kota tersebut mendaftar sebagai pengajar praktik;
7. Memberikan sanksi terhadap guru yang mengundurkan diri pada program tersebut.

Dalam pelaksanaan program di tahun 2022 realisasi jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru” sudah melebihi target, namun tetap dilakukan penyusunan strategi agar realisasi kedepannya melebihi target yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan melakukan pendekatan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terutama di daerah yang jumlah pendaftar Calon Guru Penggerak dan Pengajar Praktik yang masih sedikit.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Predikat SAKIP BGP Provinsi Kalimantan Selatan.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi dari Biro Perencanaan Kemendikbudristek maka untuk tahun 2022 BGP Provinsi Kalimantan Selatan SAKIP nya tidak dinilai dikarenakan DIPA BGP Provinsi Kalimantan Selatan baru terbit di triwulan ke 4 atau di awal bulan Oktober 2022.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, efektifitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penilaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L dilakukan atas 2 indikator yaitu Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Indikator Kinerja atas hasil

pelaksanaan anggaran (IKPA) berkontribusi 40% dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) berkontribusi 60%.

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA : 10 %;
2. Deviasi Halaman III DIPA : 10%;
3. Penyerapan Anggaran : 20%;
4. Belanja Kontraktual : 10%;
5. Penyelesaian Tagihan : 10%;
6. Pengelolaan UP dan TUP : 10%;
7. Dispensasi SPM : 5%;
8. Capaian Output : 25%.

Bobot nilai EKA dihasilkan dari capaian masing-masing variabel yaitu terdiri atas: capaian keluaran (*output*), efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Perhitungan IKK 2.2 berdasarkan jumlah dari 60% total nilai EKA dan 40% total nilai IKPA dengan Rumus:

$$NKA = (60\% \times EKA) + (40\% \times IKPA)$$

EKA = Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran

IKPA = Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kemenkeu dan dikoordinir di lingkungan Kemdikbud oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemdikbud. Berdasarkan target yang diperjanjikan di perjanjian kinerja IKK 2.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL ditargetkan dengan nilai kinerja 85, dan pada tahun 2021 BGP Provinsi Kalimantan Selatan belum ada nilai dikarenakan BGP Provinsi Kalimantan Selatan baru berdiri di tahun 2022.

Secara singkat capaian indikator kinerja kegiatan BGP Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan IKK.2.2 “Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Kalimantan Selatan”

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra	Target Akhir Renstra
		Target	Capaian	%		
Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Kalimantan Selatan	-	85	91,59	107,75	-	-

Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Kalimantan Selatan adalah hasil penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun berjalan. Pada tahun 2022 capaian yang dicapai adalah sebesar 91,59 atau lebih tinggi dari target yaitu 85 atau sebesar 107,75%. Nilai tersebut dihasilkan dari Nilai IKPA sebesar 90,97 dan Nilai EKA sebesar 92.

Dalam mencapai nilai kinerja anggaran pada tahun 2022 ini terdapat kendala/permasalahan yaitu rendahnya serapan anggaran dan capaian *output* pada awal pelaksanaan anggaran (triwulan 4) disebabkan karena baru terbitnya DIPA satker baru setelah adanya restrukturisasi organisasi pada bulan Mei. Kegiatan prioritas dilaksanakan dengan rentang waktu singkat dan jadwal yang padat namun belum diimbangi dengan kuantitas SDM BGP Provinsi Kalimantan Selatan.

Strategi/tindak lanjut dalam mengatasi kendala atau permasalahan pencapaian nilai kinerja anggaran pada tahun 2022 ini antara lain :

1. Berkoordinasi dengan eselon 1 terkait juknis/juklak pelaksanaan kegiatan;
2. Merancang jadwal percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan Prioritas Nasional; serta
3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja secara berkala.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi awal pagu anggaran BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp 18.796.011.000,-. Selama tahun 2022 pagu anggaran mengalami beberapa kali revisi pemotongan anggaran dengan pagu akhir sebesar Rp 14.445.026.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp 13.171.957.363,- dengan persentase daya serap sebesar 91,19%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai sasaran kegiatan “Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan” dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu 1) Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradig baru. 2) Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya. 3) Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru. Sasaran kegiatan selanjutnya adalah “Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan” dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu 1) Predikat SAKIP BGP Provinsi Kalimantan Selatan dan 2) Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Kalimantan Selatan.

Berikut rincian penyerapan anggaran pada BGP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data terakhir dalam Laporan Monitoring laporan Keuangan (MOLK) Kemdikbud (format B.19) disebutkan bahwa keseluruhan realisasi dengan persentase capaian sebesar 91,19%. Realisasi anggaran tersebut tersebar dalam 5 Rincian Output yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 6. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kode	Uraian	Alokasi	Realisasi	%
5634.QDC.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	6.001.866.000	5.223.538.326	87,03
5634.SCI.010	Guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	6.067.597.000	5.716.992.726	94,22
5634.SCI.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	304.500.000	270.342.601	88,78
5635.EBA.962	Layanan Umum	37.000.000	35.425.000	95,74
5635.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.034.063.000	1.925.658.710	94,67

Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Alokasi dan realisasi anggaran BGP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dikelompokkan ke dalam 2 jenis belanja, yaitu : belanja pegawai, belanja barang yang disajikan pada tabel berikut :

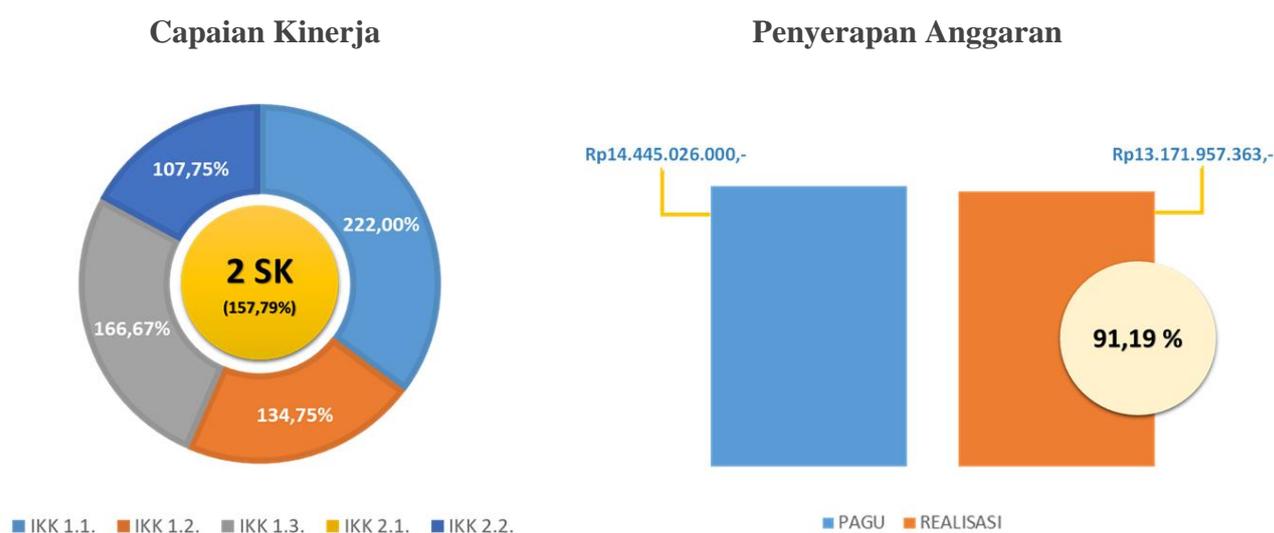
Tabel 3. 7. Alokasi dan realisasi Anggaran serta Sisa Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Pegawai	650.406.000	596.959.055	91,78
Belanja Barang	13.794.620.000	12.574.998.308	91,16

BAB IV

Penutup

Selama tahun 2022 BGP Provinsi Kalimantan Selatan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:



Gambar 4. 1. Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2022

Kinerja Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022, secara keseluruhan memiliki capaian dengan rata-rata sebesar 157,79% dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Capaian kinerja seluruh IKK melebihi 100%. Penyerapan anggaran di tahun 2022 dengan pagu akhir sebesar Rp 14.445.026.000,- dengan serapan sebesar Rp 13.171.957.363,- dengan persentase daya serap sebesar 91,19 %.

Dari hasil evaluasi kinerja tahun 2022, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan yang banyak/terlalu padat dalam kurun waktu yang singkat berpengaruh terhadap kualitas capaian kinerja dan kuantitas capaian serapan anggaran;
2. Kuantitas sumber daya manusia yang terbatas, penjadwalan, dan pembagian tugas yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan;

3. Pelaksanaan kinerja anggaran masih kurang maksimal sehingga menyebabkan IKPA dan EKA belum maksimal.

Untuk memastikan perbaikan dan meningkatkan capaian kedepannya, beberapa upaya dan strategi yang akan dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi serta melakukan perencanaan dan evaluasi berkala yang lebih sistematis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
2. Optimalisasi SDM, penyusunan jadwal, dan pembagian tugas kerja yang tepat sasaran sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mendapat hasil terbaik;
3. Perbaikan pada sistem pelaksanaan anggaran agar mendapatkan capaian yang maksimal di setiap indikator.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Awal BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
2. Revisi Perjanjian Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
3. Pengukuran Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 telah Direviu



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

Jabatan : Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banjarbaru, 21 Oktober 2022

**Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan**

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	882
		[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	5356
		[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	357
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	85

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 16.502.833.000
2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 2.293.178.000
		TOTAL	Rp. 18.796.011.000

Banjarbaru, 21 Oktober 2022

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

Jabatan : Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banjarbaru, 27 Desember 2022

**Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,**

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	882
		[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	5356
		[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	357
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	85

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 12.373.963.000
2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 2.071.063.000
		TOTAL	Rp. 14.445.026.000

Banjarbaru, 27 Desember 2022

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Tahun 2022**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	------------------	----------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------

1	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	882	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 882	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 1958	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada IKK 1.1 ini antara lain pada bulan Oktober 2022 diawali dengan kegiatan daring PMO Level Sekolah PSP AKT-1 dan AKT-2; kemudian melaksanakan kegiatan Koordinasi Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan daring dan luring; Setelah melakukan koordinasi kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan secara luring Lokakarya Kurikulum: Pengolahan dan Pelaporan Hasil Asesmen PSP AKT-2; Lokakarya Pengawas Sekolah: Komunitas Praktisi; dan Lokakarya Pembelajaran dan Asesmen PSP AKT-1; kemudian Fasilitator melakukan Kunjungan Lapangan ke Sekolah Penggerak AKT-2; pada bulan November 2022 melaksanakan kegiatan daring PMO Level Sekolah PSP AKT-1 dan AKT-2; Refleksi Coaching Pengawas sekolah PSP AKT-1; kegiatan luring Lokakarya Perencanaan Pembelajaran 2: Perancangan dan Penerapan Profil Pelajar Pancasila PSP AKT-2; Lokakarya Wawasan Kebhinekaan Global PSP AKT-2; kemudian fasilitator melakukan kunjungan lapangan ke Sekolah Penggerak AKT-1; pada bulan Desember 2022 dilaksanakan kegiatan daring PMO Level Sekolah PSP AKT-1 dan AKT-2; Refleksi Satuan Pendidikan PSP AKT-2; melaksanakan kegiatan luring Lokakarya Kurikulum 2 (Pembelajaran Proyek P5) PSP AKT-1; Lokakarya Pengawas Sekolah: Fasilitasi Kebutuhan dan Praktik Baik PSP AKT-2; Penguatan IKM, PMO, dan Layanan PSP, Bimtek Perencanaan Berbasis Data; dan ditutup dengan rangkaian perjalanan dinas dalam rangka diskusi terpumpun terkait persiapan penyelenggaraan PSP. Kendala / Permasalahan : 1. Terjadinya restrukturisasi organisasi (bulan Mei) dan DIPA satker yang lambat terbit (bulan oktober) sementara waktu pelaksanaan program/kegiatan Sekolah Penggerak sudah ada yang berlangsung sejak bulan September; 2. Kurangnya sumber daya manusia di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan sementara kebutuhan tenaga petugas atau panitia untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan yang terjadwal padat dan intens sehingga menyebabkan personel kegiatan kewalahan dan beban kerja yang lebih berat dari kondisi normal; 3. Tidak meratanya kompetensi Fasilitator dalam melakukan pendampingan ke Sekolah Penggerak; 4. Ada beberapa Fasilitator yang belum tertib dan tidak memenuhi durasi wajib pelaksanaan pendampingan secara daring; 5. Beberapa Fasilitator seringkali terbentur pelaksanaan kegiatan sehingga tidak memenuhi kewajiban di kegiatan PSP; 6. Belum adanya evaluasi dan penilaian berkala terhadap kinerja Fasilitator; 7. Minimnya jumlah pengawas sekolah di beberapa kabupaten/kota sehingga output dan sasaran kurang maksimal; 8. Kurang terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pelaksanaan kegiatan PSP yang sangat padat dan intens dengan durasi waktu yang begitu singkat harus diimbangi dengan perencanaan dan penjadwalan yang tepat, koordinasi internal maupun pihak eksternal terkait, menetapkan pola pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk perbaikan selanjutnya; 2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan segera mengadakan rekrutmen CPNS/PPPK atau mutasi di lingkungan Kemendikbudristek atau merekrut tenaga lepas tidak tetap; 3. Perlu dilakukan bimbingan teknis serta penguatan teknis dan administrasi agar dapat meningkatkan kompetensi Fasilitator; 4. Meningkatkan komunikasi, himbauan, dan penegasan terhadap aturan dan panduan pelaksanaan kegiatan; 5. Evaluasi dan penegasan komitmen dari Kepala BGP Provinsi Kalsel terhadap beberapa Fasilitator yang sering tidak melaksanakan kewajiban/tugas dikarenakan kesibukan di luar PSP. 6. Adanya instrumen dari Direktorat Teknis terkait sebagai pihak yang melakukan seleksi dan rekrutmen Fasilitator agar dapat mengevaluasi kinerja Fasilitator secara berkala; 7. Memberikan advokasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan agar segera memenuhi/menutupi kekurangan formasi pengawas sekolah; 8. Menjalin komunikasi dan mengadakan pertemuan dalam rangka koordinasi yang intens dengan pihak Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan.</p>
---	--	--	-------	-----	--	---	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	5356	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 5356	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 7217	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada IKK 1.2 antara lain Pembekalan Narasumber Berbagi Praktik Baik secara luring; Upgrading Narasumber Berbagi Praktik Baik secara daring; kegiatan Refleksi Narasumber Berbagi Praktik Baik secara luring; Kegiatan Pembekalan Komunitas Belajar secara luring; Upgrading Komunitas Belajar secara daring; dan kegiatan Refleksi Komunitas Belajar secara luring ditambah dengan kegiatan-kegiatan tambahan yang bertema atau menyajikan substansi IKM seperti pelatihan, sosialisasi, dan bimtek. Kendala / Permasalahan : 1. Terjadinya restrukturisasi organisasi (bulan Mei) dan DIPA satker yang lambat terbit (bulan oktober); 2. Kurangnya sumber daya manusia di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan sementara kebutuhan tenaga petugas atau panitia untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan yang terjadwal padat dan intens sehingga menyebabkan personel kegiatan kewalahan dan beban kerja yang lebih berat dari kondisi normal; 3. Ada salah satu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang kurang responsif dan sulit melakukan koordinasi; 4. Kurangnya alokasi anggaran program IKM sehingga menyebabkan masih banyaknya komitis belajar yang belum terakomodir mengikuti rangkaian kegiatan IKM; 5. Masih ada beberapa narasumber berbagi praktik baik yang belum berpartisipasi/belum memenuhi konten PMM. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pelaksanaan kegiatan IKM yang sangat padat dan intens dengan durasi waktu yang begitu singkat harus diimbangi dengan perencanaan dan penjadwalan yang tepat, koordinasi internal maupun pihak eksternal terkait, menetapkan pola pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk perbaikan selanjutnya; 2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan segera mengadakan rekrutmen CPNS/PPPK atau mutasi di lingkungan Kemendikbudristek atau merekrut tenaga lepas tidak tetap; 3. Menjalin komunikasi dan mengadakan pertemuan dalam rangka koordinasi yang intens dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Menambah alokasi anggaran di tahun anggaran berikutnya agar dapat mengakomodir dan memanggil peserta komunitas belajar untuk mengikuti kegiatan IKM; 5. Bekerjasama dengan Disdik Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk mensosialisasikan narasumber berbagi praktik baik di masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi.</p>
---	--	---	-------	------	---	---	--

3	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	357	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 357	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 554	TW1 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut : TW2 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut : TW3 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut : TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada IKK 1.3 ini antara lain pada bulan Oktober 2022 diawali dengan kegiatan daring Pelatihan Modul CGP AKT-5, AKT-6, dan AKT-7; Pendampingan Individu 6 dan 7 AKT-4; Pendampingan Individu 2, 3, dan 4 AKT-5; Pendampingan Individu 1 AKT-6 kemudian dilanjutkan kegiatan luring Lokakarya 7 AKT-4; Lokakarya 2 dan 3 AKT-5; Lokakarya 1 AKT-6; Rakor PPGP AKT-5, AKT-6, dan AKT-7; pada bulan November 2022 dilaksanakan kegiatan daring Pelatihan Modul CGP AKT-5, AKT-6, dan AKT-7; Pendampingan Individu 8 dan 9 AKT-4; Pendampingan Individu 5 AKT-5; Lokakarya 8 dan 9 AKT-4; dilanjutkan kegiatan luring Lokakarya 4 dan 5 AKT-5; perjalanan dinas Monev Pendampingan Individu AKT-4 dan AKT-5; pada bulan Desember 2022 dilaksanakan kegiatan daring Pelatihan Modul CGP AKT-5, AKT-6, dan AKT-7; Pendampingan Individu 6 dan 7 AKT-5; Pendampingan Individu 1 dan 2 AKT-6; Pendampingan Individu 1 AKT-7; kemudian dilanjutkan dengan kegiatan luring Lokakarya 6 dan 7 Panen Hasil AKT-5; Lokakarya Perdana, 1, dan 2 AKT-6, Lokakarya Perdana dan 1 AKT-7; Kegiatan Refleksi dan Optimalisasi Peran Guru Penggerak sebagai upaya Akselerasi IKM Tahun 2022 untuk Pengajar Praktik AKT-4 dan AKT-5; perjalanan dinas Monev Pendampingan Individu AKT-5, AKT-6, dan AKT-7; perjalanan dinas dalam rangka penguatan kompetensi penagajar praktik AKT-4 dan AKT-5. Kendala / Permasalahan : 1. Terjadinya restrukturisasi organisasi (bulan Mei) dan DIPA satker yang lambat terbit (bulan oktober); 2. Kurangnya sumber daya manusia di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan sementara kebutuhan tenaga petugas atau panitia untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan yang terjadwal padat dan intens sehingga menyebabkan personel kegiatan kewalahan dan beban kerja yang lebih berat dari kondisi normal; 3. Sulitnya melakukan koordinasi dan penerbitan surat tugas jenjang SMA/SMK/SLB oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan; 4. Sulitnya menentukan sekolah di beberapa kabupaten/kota sebagai lokasi penyelenggaraan lokakarya yang bisa mengakomodir PP dan CGP yang tidak berasal dari sekolah lokasi penyelenggara serta terbatasnya fasilitas yang mendukung tugas panitia; 5. Kurangnya kompetensi/kemampuan beberapa Pengajar Praktik terutama saat pendampingan individu dan kurangnya pengetahuan beberapa Fasilitator terhadap sistem LMS serta tidak tertib dalam pemenuhan kewajiban timespent. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pelaksanaan kegiatan PGP yang sangat padat dan intens dengan durasi waktu yang begitu singkat harus diimbangi dengan perencanaan dan penjadwalan yang tepat, koordinasi internal maupun pihak eksternal terkait, menetapkan pola pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk perbaikan selanjutnya; 2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dengan segera mengadakan rekrutmen CPNS/PPPK atau mutasi di lingkungan Kemendikbudristek atau merekrut tenaga lepas tidak tetap; 3. Menjalin komunikasi dan mengadakan pertemuan dalam rangka koordinasi yang intens dengan pihak Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan; 4. Melakukan pemetaan dan pemilihan lokasi alternatif pengganti sekolah supaya tidak terbentur dengan lokasi asal PP dan CGP saat penyelenggaraan lokakarya; 5. Melakukan evaluasi kinerja berkala dan penilaian rutin agar dapat memberikan umpan balik ke semua pihak yang terlibat serta melakukan bimbingan teknis berkelanjutan agar menjaga mutu dan kompetensi pengajar praktik dan fasilitator.
---	---	---	-------	-----	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[[IKK 2.1] Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	Predikat	-	TW1 :- TW2 :- TW3 :- TW4 :-	TW1 : TW2 : TW3 : TW4 :-	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Evaluasi dan penilaian SAKIP pada tahun 2022 masih belum dilakukan. Kendala / Permasalahan : Terjadinya restrukturisasi organisasi pada bulan Mei 2022 yang menyebabkan tahun ini tidak ada evaluasi dan penilaian SAKIP. Strategi / Tindak Lanjut : Membentuk tim kerja dan menyiapkan dokumen/bukti dukung dalam rangka pemenuhan indikator penilaian SAKIP Tahun 2023.</p>
4	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	Nilai	85	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 85	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 87.67	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kendala / Permasalahan : Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Serapan anggaran per Triwulan 4 Tahun 2022 sebesar 91,19%. Telah dilakukan 5 kali revisi DIPA. Revisi dilakukan berdasarkan arahan dari Unit Eselon 1 dan berdasarkan kebutuhan satker sendiri. Kendala / Permasalahan : Rendahnya serapan anggaran pada awal triwulan 4 disebabkan karena baru terbitnya DIPA satker baru setelah adanya restrukturisasi organisasi pada bulan Mei. Kegiatan prioritas dilaksanakan dengan rentang waktu singkat dan jadwal yang padat namun belum diimbangi dengan kuantitas SDM BGP Provinsi Kalsel. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Berkoordinasi dengan eselon 1 terkait juknis/juklak pelaksanaan kegiatan; 2. Merancang jadwal percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan Prioritas Nasional; serta 3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja secara berkala.</p>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	682.0000	Orang	0	0	0	682	Rp. 6.001.866.000
2	[052] Koordinasi dan Sosialisasi Pendampingan Pembelajaran			0	0	0	1	Rp. 925.577.000
3	[053] Pelaksanaan Pendampingan Pembelajaran			0	0	0	682	Rp. 5.076.289.000
4	Guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	336.0000	Orang	0	0	0	336	Rp. 6.067.597.000
5	[052] Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru			0	0	0	1	Rp. 1.358.245.000
6	[053] Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru			0	0	0	336	Rp. 4.615.172.000
7	[055] Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru			0	0	0	3	Rp. 94.180.000
8	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	40.0000	Orang	0	0	0	40	Rp. 304.500.000
9	[052] Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru			0	0	0	1	Rp. 59.940.000
10	[053] Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru			0	0	0	40	Rp. 244.560.000
11	Layanan Umum	1.0000	Layanan	0	0	0	1	Rp. 37.000.000
12	[060] Pelayanan Ketatausahaan			0	0	0	1	Rp. 37.000.000
13	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	0	0	0	1	Rp. 2.034.063.000
14	[001] Gaji dan Tunjangan			0	0	0	3	Rp. 650.406.000
15	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			0	0	0	3	Rp. 1.383.657.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 14.445.026.000

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Banjarbaru, 12 Januari 2023

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan,



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI GURU PENGGERAK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Jalan Ambulung, Loktabat Selatan, Banjarbaru 70712
Telepon (0511) 4772187 Laman <https://bgpkalsel.kemdikbud.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 30 Januari 2023

Ketua Tim Reviu

Wulan Surandika

NIP 198310162010122002



WWW.BGPKALSEL.KEMDIKBUD.GO.ID



BGP KALIMANTAN SELATAN



BGP.KALSEL